

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CaLK)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan (SAP, 2010). Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi mengenai Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan (SAP, 2010):

(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya air serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- (a) menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- (b) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.
- (c) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- (d) menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- (e) menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- (f) menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
- (g) menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya

Komponen laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan Atas Laporan Keuangan
4. Laporan Operasional
5. Laporan Perubahan Ekuitas
6. Catatan atas Laporan Keuangan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pelaporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

- a. Undang-undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- c. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- d. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
- e. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
- f. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
- g. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- i. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- j. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- n. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- q. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Dearah Provinsi Jawa Tengah;
- r. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
- s. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
- t. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No. 903/0017608 Tanggal 8 Nopember 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan APBD dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

- I. Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran
- II. Neraca Komparatif SKPD
- III. Laporan Realisasi Anggaran SKPD per objek
- IV. Laporan Realisasi Anggaran SKPD sesuai PP 71 Tahun 2010
- V. Neraca Komparatif SKPD
- VI. Laporan Operasional SKPD
- VII. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD
- VIII. Catatan atas Laporan Keuangan

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 1.1. Ekonomi Makro
- 1.2. Kebijakan Keuangan

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 8.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- 8.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD
- 4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1. Penjelasan Pos-Pos Neraca
 - 5.1.1. Aset
 - 5.1.2. Kewajiban
 - 5.1.3. Ekuitas Dana
- 5.2. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Keuangan
 - 5.2.1. Pendapatan
 - 5.2.2. Belanja
- 5.3. Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1. Pendapatan
 - 5.3.2. Beban

Bab 6. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab 7. Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, dan PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1. Ekonomi Makro

Ekonomi makro dibidang pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah tergambar dalam luas area layanan irigasi di Provinsi Jawa Tengah sebesar 953.824 Ha yang tercakup dalam 11.542 Daerah Irigasi (DI). Pembagian kewenangan pengelolaan Daerah Irigasi (DI) di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

No	Kewenangan	Luar Area (Ha)	%	Jumlah Daerah Irigasi (DI)
1	Pusat	347.674	34,96	33
2	Provinsi	86.865	8,69	108
3	Kabupaten/Kota	519.285	56,35	11.401
	Jumlah	953.824	100	11.542

Sedangkan berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), di Provinsi Jawa Tengah terdapat 202 DAS yang dikelompokkan dalam 10 Wilayah Sungai (WS) terdiri dari : 6 WS kewenangan Pusat yaitu Cimanuk Cisanggarung, Bengawan Solo, Progo Opak Oyo, Citanduy, Jratunseluna dan Serayu Bogowonto; 2 WS kewenangan Provinsi Jawa Tengah yaitu Pemali Comal dan Bodri Kuto; dan 2 WS kewenangan Kabupaten Jepara yaitu Wiso Gelis dan Kepulauan Karimunjawa Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

2.1. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 122 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, dan untuk menjadi pedoman teknis pengelolaan keuangan di Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, maka Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

Pedoman Administrasi Keuangan Daerah Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 mencakup:

- a. Pelaksana penatausahaan administrasi keuangan
- b. Standar minimal dokumen
- c. Pembukuan
- d. Pertanggungjawaban (SPJ)
- e. Pengawasan
- f. Pelaporan

BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

Pencapaian target kegiatan di Dinas Pengelolaan Sumber Day Air Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 tercapai 100%, serta tidak terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan kegiatan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Kebijakan akuntansi Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai entitas akuntansi mengacu pada Peraturan Gubernur No. 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

4.2. Basis dan Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi menggunakan basis akuntansi basis akrual, yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 dan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 120 tahun 2016, bahwa SKPD.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setaio saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan terhitung dari tanggal.

4.3.2. Kas dan Setara Kas di Bendahara Penerimaan

Kas dan Setara Kas merupakan kelompok akun sama yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran, yang digunakan untuk mencatat kas setara.

4.3.3. Persediaan

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah nomor: 903/0017608 tanggal 8 Nopember 2017 bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik yaitu pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak mengupdate jumlah persediaan. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname) yang dituangkan pada Berita Acara Hasil Stock Opname per 31 Desember 2016.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

4.3.4. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4.3.5. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

4.3.6. Peralatan dan Mesin

- Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

- Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
- Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

4.3.7. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

4.3.8. Jalan, Jaringan dan Instalasi

- Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
- Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
- Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

4.3.9. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

4.3.10. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

4.3.11. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh temponya dalam tahun anggaran berjalan.

4.3.12. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo melebihi satu tahun anggaran.

4.3.13. Ekuitas

Ekuitas dana terdiri dari :

- Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- Ekuitas Dana Cadangan

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No 45 tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 atau 92,59% dari target Rp4.417.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	Rp 3.820.879.155
Pendapatan Transfer	-	-	-	-
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	Rp 3.820.879.155

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 atau 92,59% dari target Rp4.417.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	Rp 3.820.879.155
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	Rp -	-	-
Jumlah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	Rp 3.820.879.155

5.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 atau 92,59% dari target Rp4.417.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.579.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Jasa Umum	-	-	-	-
Retribusi Jasa Usaha	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	3.820.579.155
Retribusi Perizinan Tertentu	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	Rp 3.820.579.155

5.1.1.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 atau 92,59% dari target Rp4.417.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp3.820.579.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	3.820.579.155
Retribusi Tempat Pelelangan	-	-	-	-
Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ Villa	-	-	-	-
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 4.417.700.000	Rp 4.090.328.708	92,59%	Rp 3.820.579.155

5.1.1.1.2. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp0,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp300.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	Rp -	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-	-	-
Jumlah	-	Rp -	-	300.000,00

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

5.1.2.1. BELANJA OPERASI

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp313.731.816.131,00 atau 93,26% dari anggaran Rp335.742.486.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp297.820.862.182,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	Rp 98.570.610.000	Rp 97.044.015.230	98,45%	Rp 91.317.278.528
Belanja Barang & Jasa	Rp 75.611.366.000	Rp 72.201.675.369	95,49%	Rp 55.070.915.876
Belanja Modal	Rp 161.560.510.000	Rp 143.870.379.762	89,05%	Rp 150.432.667.778
Jumlah	Rp 335.742.486.000	Rp 313.116.070.361	93,26%	Rp 296.820.862.182

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

.Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp97.044.015.230,00 atau 98,45% dari anggaran Rp 98.570.610.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp91.317.278.528,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	Rp 75.726.979.000	Rp 75.384.254.230	99,55%	Rp 78.333.148.528
Belanja Pegawai langsung	Rp 22.843.631.000	Rp 21.659.761.000	94,82%	Rp 12.984.130.000
Jumlah	Rp 98.570.610.000	Rp 97.044.015.230	98,45%	Rp 91.317.278.528

5.1.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp72.201.675.369,00 atau 95,49% dari anggaran Rp75.611.366.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp55.070.915.876,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016		%	Realisasi 2015
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Habis Pakai	Rp 4.497.283.000	Rp 4.430.318.881	98,51%	Rp 2.982.171.067
Belanja Bahan/Material	Rp 6.788.784.000	Rp 6.581.501.116	96,95%	Rp 3.964.164.390
Belanja Jasa Kantor	Rp 3.050.112.000	Rp 2.652.921.671	86,98%	Rp 2.207.443.425
Belanja Premi Asuransi	Rp 90.821.000	Rp 84.866.000	93,44%	Rp 59.737.000
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	Rp 2.383.386.000	Rp 2.367.344.973	99,33%	Rp 2.975.689.901
Belanja Cetak dan Pengadaan	Rp 1.610.184.000	Rp 1.545.259.481	95,97%	Rp 1.103.061.989
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	Rp 300.600.000	Rp 237.180.000	78,90%	Rp 239.810.000
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	Rp 169.600.000	Rp 138.720.000	81,79%	Rp 131.567.500
Belanja Sewa Alat Berat	Rp 319.380.000	Rp 317.764.250	99,49%	Rp 221.673.500
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	Rp 205.260.000	Rp 204.350.000	99,56%	Rp 171.860.000
Belanja Makanan dan Minuman	Rp 2.023.990.000	Rp 1.707.350.600	84,36%	Rp 1.158.199.500
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				Rp 137.175.000
Belanja Pakaian Kerja	Rp 21.824.000	Rp 19.500.000	89,35%	Rp 21.750.000
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu				-
Belanja Perjalanan Dinas	Rp 13.431.058.000	Rp 12.185.387.247	90,73%	Rp 7.742.627.508
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
Belanja Kursus Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	Rp 38.000.000	Rp 30.000.000	78,95%	Rp 18.300.000
Belanja Pemeliharaan	Rp 36.864.542.000	Rp 36.014.962.150	97,70%	Rp 29.440.207.550
Belanja Jasa Konsultasi	Rp 3.563.342.000	Rp 3.486.869.000	97,85%	Rp 2.309.202.546
Belanja Barang & Jasa BLUD				
Belanja Hibah Barang	Rp 30.900.000	Rp 23.840.000	77,15%	Rp 16.775.000
Uang untuk dihibahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	Rp 222.300.000	Rp 173.540.000	78,07%	Rp 169.500.000
Jumlah	Rp 75.611.366.000	Rp 72.201.675.369	95,49%	Rp 55.070.915.876

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp143.870.379.762,00 atau 89,05% dari anggaran Rp161.560.510.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp150.432.667.778,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	Rp 7.297.197.000	Rp 6.756.238.648	92,59%	-
Belanja Peralatan dan Mesin	Rp 5.689.681.000	Rp 5.082.046.345	89,32%	Rp 6.355.068.409
Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 2.643.478.000	Rp 2.575.967.000	97,45%	Rp 2.151.414.000
Belanja Jalan, Jembatan, irigasi dan Jaringan	Rp 145.930.154.000	Rp 129.456.127.769	88,71%	Rp 141.926.185.369
Belanja Aset Tetap Lainnya		-	-	-
Jumlah	Rp 161.560.510.000	Rp 143.870.379.762	89,05%	Rp 150.432.667.778

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp5.082.046.345,00 atau 88,93% dari anggaran Rp5.714.671.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp6.355.068.409,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	Rp 338.965.000	Rp 289.877.000	85,52%	Rp 1.999.179.000
Belanja Alat-alat Angkut	Rp1.400.000.000	Rp1.232.356.045	88,03%	Rp 486.765.000
Belanja Alat-alat Bengkel	Rp 685.473.000	Rp 663.923.000	96,86%	Rp 1.239.823.000
Belanja Alat-alat Pertanian			-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan rumah Tangga	Rp3.009.171.000	Rp2.634.750.300	87,56%	Rp 2.144.330.409
Belanja Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 281.062.000	Rp 261.140.000	92,91%	Rp 484.971.000
Belanja Alat-alat Kedokteran			-	-
Belanja Alat-alat Laboratorium			-	-
Belanja Alat-alat Keamanan			-	-
Jumlah	Rp5.714.671.000	Rp5.082.046.345	88,93%	Rp 6.355.068.409

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp2.575.967.001,00 atau 97,45% dari anggaran Rp2.643.478.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 2.151.414.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	2.643.478.000	2.575.967.001	97,45%	Rp 2.151.414.000
Belanja Monumen			-	-
Jumlah	2.643.478.000	2.575.967.001	97,45%	Rp 2.151.414.000

5.1.2.1.3.3. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp129.456.127.769,00 atau 88,73% dari anggaran Rp145.893.364.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp141.926.185.369,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017		%	Realisasi 2016
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Jalan dan Jembatan			-	-
Belanja Bangunan Air (Irigasi)	Rp 145.893.364.000	Rp 129.456.127.769	88,73%	Rp 141.905.314.469
Belanja Instalansi dan Jaringan				Rp 20.870.900
Jumlah	Rp 145.893.364.000	Rp 129.456.127.769	88,73%	Rp 141.926.185.369

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIYAAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2017 sebesar minus Rp309.025.741.653,00, sedangkan Tahun 2016 minus sebesar Rp292.999.983.027,00.

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2017 sebesar Rpnaik sebesar Rp5.992.527.102.042,00 atau 2,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.846.932.441.531,00.

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.009.745.196.000, naik sebesar Rp344.059.752,67 atau 51,69% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp665.685.443,33.

5.2.1.1.1. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada Tahun 2017, namun SKPD telah melakukan pembayaran pada Tahun 2017 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut berupa Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS. Beban Dibayar Dimuka Per 31 Desember 2017 sebesar Rp70.721.667,00, naik sebesar Rp20.940.833,67 atau 42,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 49.780.833,33 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	2016
Asuransi BMD	70.721.667,00	49.780.833,33
Asuransi Pegawai Non PNS	-	-
Sewa	-	-
Jumlah	70.721.667,00	49.780.833,33

5.2.1.1.2. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2017. Persediaan per 31 Desember 2017 sebesar Rp939.023.529,00, naik sebesar Rp323.118.919,00 atau 52,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp615.904.610,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	2016
Persediaan Bahan Pakai Habis	52.217.250	48.440.860
Persediaan Bahan/Material	879.345.879	519.896.850
Persediaan Cetak	7.460.400	72.500
Persediaan Pakaian Dinas/Kerja	-	47.494.400
Persediaan Makanan dan Minuman	-	-
Persediaan Hibah	-	-

5.2.1.2. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.992.527.102.042,00 naik sebesar Rp145.594.660.511,00 atau 2,49% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.846.932.441.531,00 dengan rincian sebagai berikut:

Saldo Awal	Rp	5.846.932.441.531,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	143.870.379.762,00
Belanja Barang/Jasa		
Hibah		
Mutasi Masuk	Rp	2.072.011.639,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	1.985.904.351,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya		
Koreksi		
Jumlah	Rp	147.928.295.752,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	192.660.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	1.985.904.351,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	155.070.890,00
Mutasi Keluar		
Koreksi		
Jumlah	Rp	2.333.635.241,00
Saldo Akhir		5.992.527.102.042,00

Mutasi bertambah adalah sebagai berikut :

- ✓ Belanja Modal selama Tahun 2017 sebesar 143.870.379.762,00.
- ✓ Reklasifikasi Masuk Aset terdiri dari penggabungan Bidang Penataan Ruang Dinas CIPTAKARU Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp1.767.502.115,00, mutasi masuk dari BPKAD Provinsi Jawa Tengah sebesar 297.970.000,00 dan BKD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp6.539.524,00.
- ✓ Reklas masuk selama tahun 2017 sebesar 1.985.904.351,00 karena perbedaan kategori aset antara anggaran dengan pengurus aset/barang.

Mutasi berkurang adalah sebagai berikut :

- ✓ Ekstrakomtable atas belanja modal selama tahun 2017 sebesar Rp192.660.000,00.
- ✓ Reklasifikasi keluar aset tetap ke aset lain-lain sebesar Rp155.070.890,00.

5.2.1.2.1. Tanah

Tanah per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.249.691.800.809,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.242.935.562.161,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2017
Tanah	Rp 5.242.935.562.161	Rp 6.756.238.648	Rp -	Rp 5.249.691.800.809
Jumlah	Rp 5.242.935.562.161	Rp 6.756.238.648	Rp -	Rp 5.249.691.800.809

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	5.242.935.562.161,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	6.756.238.648,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	6.756.238.648,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir		<u>5.249.691.800.809,00</u>

5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 sebesar Rp48.043.729.885,00 naik sebesar Rp6.880.225.094,00 atau 16,71% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp41.163.474.791,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	Bertambah	Berkurang	2016
Alat Berat	20.318.260.500,00	2.072.229.115,00	-	22.390.489.615,00
Alat Angkut	4.631.537.757,00	1.530.326.045,00	-	6.161.863.802,00
Alat Bengkel dan Ukur	1.479.002.000,00	663.923.000,00	645.673.000,00	1.497.252.000,00
Alat Pertanian dan Peternakan	-	-	-	-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	10.770.829.229,00	2.732.769.824,00	305.417.540,00	13.198.181.513,00
Alat Studio dan Komunikasi	2.124.603.200,00	261.140.000,00	73.630.000,00	2.312.113.200,00
Alat Kedokteran	-	-	-	-
Alat Laboratorium	1.831.751.355,00	644.743.000,00	-	2.476.494.355,00
Alat Keamanan	7.490.750,00	-	155.350,00	7.335.400,00
Jumlah	41.163.474.791,00	7.905.130.984,00	1.024.875.890,00	48.043.729.885,00

Rincian mutasi peralatan dan mesin terdiri dari:

Saldo Awal	Rp	41.163.474.791,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	5.082.046.345,00
Belanja Barang/Jasa		
Hibah		
Mutasi Masuk	Rp	2.072.011.639,00
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	751.073.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya		
Koreksi		
Jumlah	Rp	7.905.130.984,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	192.660.000,00
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	751.073.000,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	81.142.890,00
Mutasi Keluar		
Koreksi		
Jumlah	Rp	1.024.875.890,00
Saldo Akhir	Rp	48.043.729.885,00

5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp19.443.989.375,00 naik sebesar Rp2.652.517.000,00 atau 15,80% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp16.791.472.375,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2017
Gedung	16.791.472.375	2.726.445.000	73.928.000	18.434.850.000
Monumen	1.009.139.375			1.009.139.375
Jumlah	16.791.472.375	2.151.414.000	73.928.000	19.443.989.375

Rincian mutasi gedung dan bangunan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	16.791.472.375,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	2.575.967.000,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	150.478.000,00
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	2.726.445.000,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	73.928.000,00
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	73.928.000,00
Saldo Akhir	Rp	19.443.989.375,00

5.2.1.2.4. Jalan, irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan jaringan per 31 Desember 2017 sebesar Rp672.679.672.734,00 naik sebesar Rp128.221.296.418,00 atau 23,55% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp544.458.376.316,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2017
Jalan dan Jembatan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Bangunan Air / Irigasi	Rp 544.043.924.749	Rp 129.434.611.769	Rp 1.234.831.351	Rp 672.243.705.167
Instalasi	Rp 414.451.567	Rp 21.516.000	Rp -	Rp 435.967.567
Jaringan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 544.458.376.316	Rp 129.456.127.769	Rp 1.234.831.351	Rp 672.679.672.734

Rincian mutasi jalan, irigasi dan jaringan terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	544.458.376.316,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	129.456.127.769,00
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	129.456.127.769,00
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	1.234.831.351,00
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	1.234.831.351,00
Saldo Akhir	Rp	672.679.672.734,00

5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2016 sebesar Rp87.972.866,00 tetap dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp87.972.866,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2017
Buku Perpustakaan	Rp 87.972.866	Rp -	Rp -	Rp 87.972.866
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Hewan Ternak dan Tumbuhan	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
Jumlah	Rp 87.972.866	Rp -	Rp -	Rp 87.972.866

Rincian mutasi aset tetap lainnya terdiri dari :

Saldo Awal	Rp	87.972.866,00
Penambahan		
Belanja Modal	Rp	-
Belanja Barang/Jasa	Rp	-
Hibah	Rp	-
Mutasi Masuk	Rp	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Berkurang		
Ekstrakontable	Rp	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp	-
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp	-
Mutasi Keluar	Rp	-
Koreksi	Rp	-
Jumlah	Rp	-
Saldo Akhir	Rp	87.972.866,00

5.2.1.2.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 sebesar Rp2.579.936.373,00 naik sebesar Rp1.084.353.351,00 atau 72,50% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.495.583.022,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2017
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 1.495.583.022	Rp 1.084.353.351	Rp -	Rp 2.579.936.373
Jumlah	Rp 1.495.583.022	Rp 1.084.353.351	Rp -	Rp 2.579.936.373

Penjelasan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

No	Kegiatan /Pekerjaan	Lokasi	Realisasi	Fisik (100%)
1	Survey Identifikasi DI. Bapang (Kab. Sukoharjo)	Kab. Sukoharjo	Rp 52.760.022	100%
2	DD. DI. Tinggal (Kab. Temanggung)	Kab. Temanggung	Rp 493.632.000	100%
3	DD. Penanganan Pantai Timur Semarang /Demak	Kota Semarang dan Kab. Demak	Rp 949.191.000	100%
4	Study Basic Desain Waduk Bodri	Kab. Kendal	Rp 1.084.353.351	100%
	Jumlah		Rp 2.527.176.351	

5.2.1.2.7. Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.536.522.2017,00 naik sebesar Rp155.070.890,00 atau 11,23% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.495.583.022,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2016	Bertambah	Berkurang	2017
Alat-alat Besar	Rp 169.620.000	Rp -	Rp -	Rp 169.620.000
Alat-alat Angkutan	Rp 443.640.000	Rp -	Rp -	Rp 443.640.000
Alat-alat Bengkel	Rp 51.850.000	Rp -	Rp -	Rp 51.850.000
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 551.919.317	Rp 80.987.540	Rp -	Rp 632.906.857
Alat-alat Studio dan Komunikasi	Rp 162.672.000	Rp -	Rp -	Rp 162.672.000
Alat-alat Laboratorium	Rp 1.750.000	Rp -	Rp -	Rp 1.750.000
Alat-alat Keamanan	Rp -	Rp 155.350	Rp -	Rp 155.350
Bangunan Gedung	Rp -	Rp 73.928.000	Rp -	Rp 73.928.000
Jumlah	Rp 1.381.451.317	Rp 155.070.890	Rp -	Rp 1.536.522.207

5.2.1.2.8. Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2017 sebesar Rp171.539.033.667,01 naik sebesar Rp33.563.956.920,18 atau 24,33% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp137.975.076.746,83 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016
Alat-alat Besar	Rp 13.199.967.736,50	Rp 14.361.146.348,00
Alat-alat Angkut	Rp 2.853.736.884,65	Rp 3.429.022.873,15
Alat-alat Bengkel	Rp 412.024.799,60	Rp 667.362.999,40
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 8.186.002.268,70	Rp 9.617.250.403,85
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 1.597.319.100,00	Rp 1.767.634.200,00
Alat Laboratorium	Rp 808.642.891,00	Rp 1.064.282.903,37
Alat Keamanan	Rp 7.490.750,00	Rp 7.335.400,00
Bangunan Gedung	Rp 7.651.228.095,68	Rp 7.973.980.787,92
Bangunan Monumen	Rp 173.063.245,00	Rp 193.246.032,50
Bangunan Irigasi	Rp 102.997.574.588,20	Rp 132.358.646.979,95
Buku dan Perpustakaan	Rp 88.026.387,50	Rp 99.124.738,87
Jumlah	Rp 137.975.076.746,83	Rp 171.539.033.667,01

5.2.1.2.9. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 1.381.451.317,00 dan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp 1.536.522.207,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016
Alat-alat Besar	Rp 169.620.000,00	Rp 169.620.000,00
Alat-alat Angkut	Rp 443.640.000,00	Rp 443.640.000,00
Alat-alat Bengkel	Rp 51.850.000,00	Rp 51.850.000,00
Alat Kantor dan Rumah Tangga	Rp 551.919.317,00	Rp 632.906.857,00
Alat Studio dan Komunikasi	Rp 162.672.000,00	Rp 162.672.000,00
Alat Laboratorium	Rp 1.750.000,00	Rp 1.750.000,00
Alat Keamanan	Rp -	Rp 155.350,00
Bangunan Gedung	Rp -	Rp 73.928.000,00
Jumlah	Rp 1.381.451.317,00	Rp 1.536.522.207,00

5.2.2. EKUITAS

Total Ekuitas per 31 Desember 2017 sebesar Rp5.416.810.084.814,15, turun sebesar Rp121.570.109.647,03 atau 1,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp5.511.546.658.306,64.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul hak pemerintah untuk menagih selama Tahun Anggaran 2017. Pendapatan-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 naik sebesar Rp269.449.553,00 atau 7,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	2016
Pendapatan Asli daerah	Rp4.090.328.708,00	Rp3.820.879.155,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	-	-
Jumlah	Rp4.090.328.708,00	Rp3.820.879.155,00

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 naik sebesar Rp269.449.553,00 atau 7,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	2017	2016
Pendapatan Pajak Daerah	-	-
Pendapatan Retribusi Daerah	4.090.328.708,00	3.820.579.155,00
Lain-Lain PAD yang sah	-	300.000,00
Jumlah	4.090.328.708,00	3.820.879.155,00

5.3.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp4.090.328.708,00 naik sebesar Rp269.449.553,00 atau 7,05% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp3.820.879.155,00 dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	2016
Retribusi Jasa Umum	-	-
Retribusi Jasa Usaha	4.090.328.708,00	3.820.579.155,00
Retribusi Perizinan Tertentu	-	300.000,00
Jumlah	4.090.328.708,00	3.820.879.155,00

5.3.1.1.2. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-Lain PAD yang Sah-LO per 31 Desember 2017 sebesar Rp,00 naik/turun 100% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp300.000,00. dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	2017	2016
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	-	300.000,00
Pendapatan Bunga	-	-
Tuntutan Ganti Rugi	-	-
Pendapatan Denda keterlambatan	-	-
Pendapatan Denda Pajak	-	-
Pendapatan Denda Retribusi	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-
Penerimaan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	-	-
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Penerimaan dari BLUD	-	-
Penerimaan Lain-Lain	-	-
Jumlah	-	300.000,00

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh pengguna anggaran dan barang telah diterima.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban per 31 Desember 2017 sebesar Rp202.582.105.501,71 naik sebesar Rp27.946.187.612,74 atau 16,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp174.635.916.888,94.

Keterangan	2017	2016
Beban Pegawai	97.044.015.230,00	91.317.278.528,00
Beban Barang & Jasa	71.857.615.616,33	55.405.038.342,67
Beban Penyusutan dan Amortisasi	33.680.473.655,38	27.913.600.018,27
Beban Lainnya	-	-
Jumlah	202.582.104.501,71	174.635.916.888,94

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2017 sebesar Rp97.044.015.230,00 naik sebesar Rp5.726.736.702,00 atau 6,27% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp91.317.278.528,00.

Keterangan	2016	2015
Beban Pegawai Tidak langsung	75.384.254.230,00	78.333.148.528
Beban Pegawai Langsung	21.659.761.000,00	12.984.130.000
Jumlah	97.044.015.230,00	91.317.278.528,00

5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2017 sebesar Rp71.857.615.616,33 naik sebesar Rp16.452.577.273,66 atau 29,70% dibandingkan saldo per 31 Desember 2016 sebesar Rp55.405.038.342,67.

Keterangan	2017	2016
Beban Persediaan	13.960.811.159,00	9.699.615.246,00
Beban Jasa	7.101.730.087,33	5.359.098.137,67
Beban Pemeliharaan	38.382.307.123,00	32.415.897.451,00
Beban Perjalanan Dinas	12.185.387.247,00	7.742.627.508,00
Beban Barang & Jasa Lainnya	227.380.000,00	187.800.000,00
Jumlah	71.857.615.616,33	55.405.038.342,67

5.3.2.1.3. Beban Penyusutan/Amortisasi Aset

Beban Penyusutan/Amortisasi Aset Per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.913.600.018,27 naik sebesar Rp10.439.950.777,08 atau 44,92% dibandingkan saldo Per 31 Desember 2016 sebesar Rp27.913.600.018,27 .

Keterangan	2017	2016
Beban Penyusutan Aset Tetap	33.680.473.655,38	23.240.522.878,30
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-
Beban Penyusutan Aset tetap Rusak Berat	-	-
Jumlah	33.680.473.655,38	23.240.522.878,30

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Perubahan ekuitas nilai aset Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Per 31 Desember 2017 sebagai berikut:

No	Uraian	LRA	
1	Ekuitas Awal	Rp	5.709.810.067.841,15
2	Surplus/Defisit - LO	Rp	(198.491.775.793,71)
3	RK PPKD	Rp	309.025.741.653,00
4	Dampak Akumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	Rp	228.366.259,20
4.1	Koreksi/Penyesuaian Kas		
4.2	Koreksi/Penyesuaian Piutang	Rp	-
	- Koreksi/Penyesuaian Piutang Lainnya	Rp	-
4.3	Koreksi/Penyesuaian Penyisihan Piutang	Rp	-
4.4	Koreksi/Penyesuaian Persediaan	Rp	-
4.5	Koreksi/Penyesuaian Investasi Non Permanen	Rp	-
4.6	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap:	Rp	111.849.524,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap	Rp	(43.221.366,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset	Rp	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya	Rp	155.070.890,00
4.7	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan:	Rp	116.516.735,20
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	Rp	116.516.735,20
4	Ekuitas Akhir	Rp	5.820.572.399.959,64

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan salah satu organisasi pemerintah di Provinsi Jawa Tengah, mempunyai strategi dan kebijakan untuk meraih keberhasilan dan tekad menunjang program nasional utamanya dalam sektor pangan. Konsep satu sungai satu rencana dan satu pengelolaan secara terpadu merupakan pegangan yang senantiasa dikembangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam penanganan permasalahan pengelolaan sumber daya air seperti banjir dengan daya rusak air, kekeringan, kualitas air dengan pencemaran lingkungan serta kebutuhan pasokan air baku untuk minum, irigasi, perikanan, listrik dan pariwisata, dapat direncanakan secara menyeluruh dan berkelanjutan dari hulu sampai hilir.

Pencanangan Otonomi Daerah yang dimulai tahun 2001 dan dengan terbitnya Undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, telah mempengaruhi perubahan paradigma pengelolaan sumber daya air diluar kewenangan provinsi sehingga banyak fasilitas Sumber Daya Air yang kurang mendapat perhatian oleh kabupaten/kota termasuk pelaksanaan Operasi Pemeliharaan yang tidak terintegrasi dapat berakibat fungsi jaringan menjadi kurang optimal. Selanjutnya dengan ketentuan Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala LAN nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mengharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah untuk menyusun dan merumuskan Perencanaan Strategik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasar Peraturan Daerah No 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas pokok *melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan*. Untuk Melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang sumber daya air;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang sumber daya air;
3. Pembinaan dan fasilitas bidang sumber daya air lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pelaksanaan tugas di bidang pengembangan dan pembinaan teknis, irigasi dan air baku, sungai waduk dan pantai, dan kerjasama pendayagunaan sumber daya air;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang sumber daya air;
6. Pelaksanaan kesekretariatan dinas;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.3. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 Susunan Organisasi Dinas PSDA Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

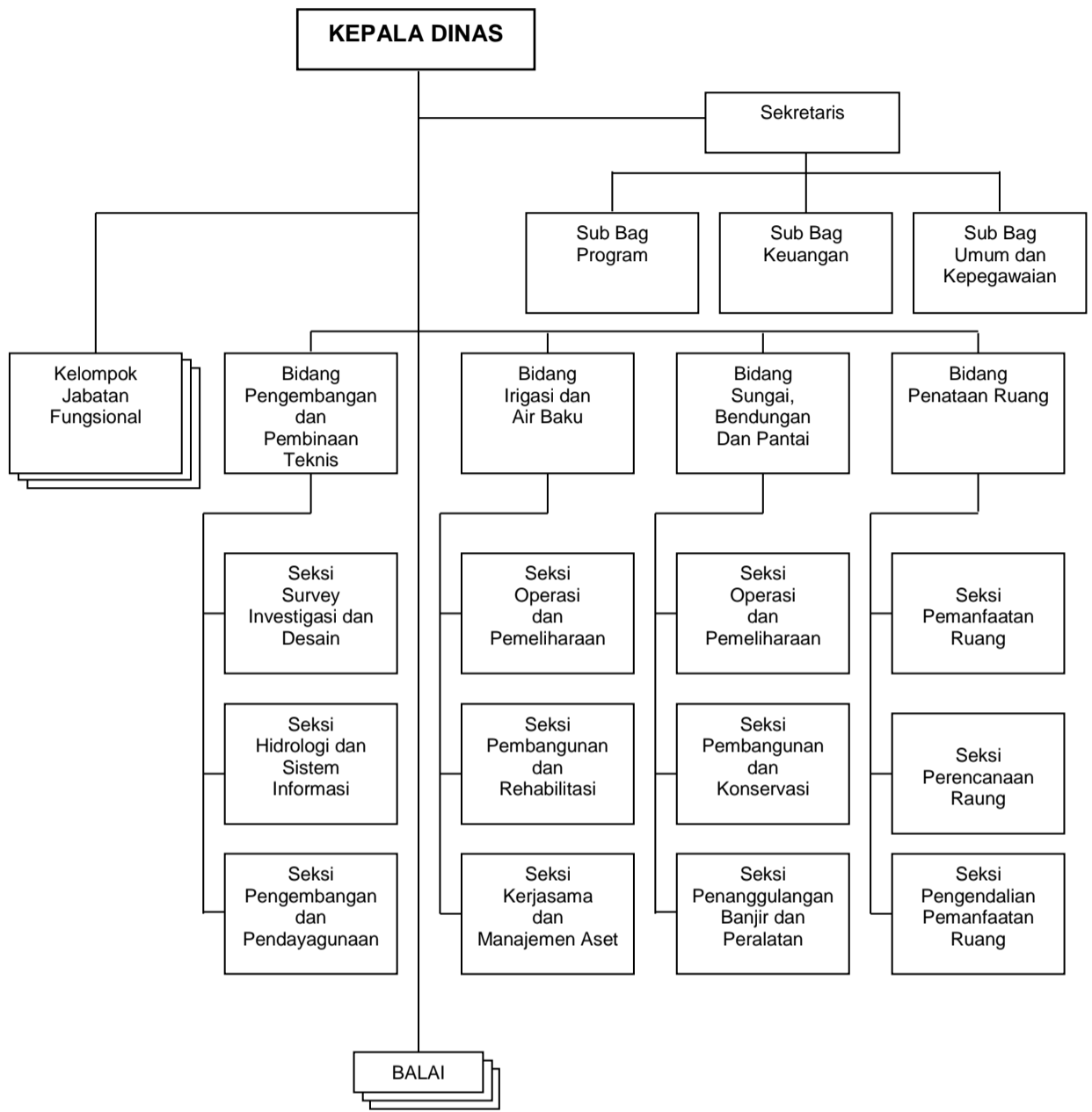
- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari 3 Sub Bagian :
 1. Sub Bagian Program
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis (PPT), terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Survey, Investigasi dan Desain
 2. Seksi Hidrologi dan Sistem Informasi
 3. Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan
- d. Bidang Irigasi dan Air Baku (IAB), terdiri dari 2 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi
 3. Seksi Kerjasama dan Manajemen Aset
- e. Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai (SBP), terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
 2. Seksi Pembangunan dan Konservasi
 3. Seksi Penanggulangan Banjir dan Peralatan
- f. Bidang Penataan Ruang, terdiri dari 3 seksi:
 1. Seksi Pemanfaatan Ruang
 2. Seksi Perencanaan Ruang
 3. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang

g. UPTD, terdiri dari:

1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal
2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Jragung Tuntang
3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serang Lusi Juana
4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo
5. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Progo Bogowonto Luk Ulo
6. Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Serayu Citanduy

h. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PU SDA TARU PROVINSI JAWA TENGAH



6.4. Visi dan Misi

6.4.1. Visi

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan eksistensi organisasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di masa depan, telah menetapkan visi:

"Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang handal dengan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat secara adil, merata dan berkelanjutan yang bertumpu pada kemandirian dan swadaya masyarakat".

6.4.2. Misi

- 1). Mewujudkan pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap upaya konservasi Sumber Daya Air secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2). Mewujudkan pengembangan Sumber Daya Air secara terpadu berkelanjutan dan kelestarian fungsi prasarana dan sarana SDA.
- 3). Mengurangi dampak kerusakan akibat banjir dan kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber-sumber produksi pertanian.
- 4). Mewujudkan tata pengaturan air yang berwawasan lingkungan secara optimal, terpadu dan berkelanjutan.
- 5). Mewujudkan pengelolaan Sumber Daya Air yang memberikan keadilan bagi masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan antar daerah dan antar kepentingan.

6.5. Ketentuan Perundang-Undangan Yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

Ketentuan Perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasional khususnya pengelolaan Irigasi/Rawa, Sungai sebagai berikut :

6.5.1. Pengelolaan Irigasi/Rawa

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi;
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 160 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Partisipatif di Provinsi Jawa Tengah.
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 611/23/2010 tentang Pembentukan Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.

- Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Wewenang, Tugas dan Tanggung jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi.

6.5.2. Pengelolaan Sungai

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan ekosistemnya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air.
- Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
- Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan
- Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2011 tentang Sungai
- Keputusan Presiden Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 48/PRT/1990 tentang Pengelolaan atas air dan atau Sumber Air pada Wilayah Sungai.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
- Permen PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan Jo. Kepmen Kimpraswil Nomor 296 /KPTS /2001 tentang Perubahan Peraturan Menteri PU Nomor 72/PRT/1997 tentang Keamanan Bendungan.
- Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Kawasan Lindung Propinsi Jawa Tengah.

BAB 7 PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI JAWA TENGAH



PRASETYO BUDIE YUWONO, ME

Pembina Utama Madya
NIP.19580905 198302 1 001